

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola.¹⁵

Seorang yang menjadi manajer mengambil alih kewajiban-kewajiban baru, yang seluruhnya bersifat manajerial. Hal yang penting di antaranya adalah meniadakan kecenderungan untuk melaksanakan sendiri semua urusan. Tugas-tugas operasional dicapai melalui usaha kerja para bawahan sang manajer. Pada hakikatnya, tugas seorang manajer adalah menggunakan usaha para bawahan secara berdaya guna. Akan tetapi, para manajer jarang benar-benar menghabiskan waktunya dengan pengelolaan, biasanya mereka melaksanakan suatu pekerjaan non manajemen

2. Manajemen POAC

Menurut George R. Terry, Dalam proses manajemen, manajer akan menjalankan empat fungsi berikut:¹⁶

¹⁵ George R. Terry dan L. W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bumi Aksara, 2019).2

¹⁶ Ibid.

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain perencanaan adalah menentukan tujuan dan bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses menugaskan, mengalokasikan sumber daya, serta mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan kepada setiap individu dan/atau kelompok yang akan berperan dalam melaksanakan rencana yang ada.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan merupakan suatu proses mengarahkan, membimbing dan mendorong karyawan dalam melaksanakan suatu rencana untuk mencapai tujuan.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian merupakan suatu proses mengawasi dan mengevaluasi dengan mencocokkan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi beserta hasil yang diperolehnya dengan rencana yang telah disusun oleh organisasi tersebut beserta tujuan yang telah ditetapkannya.

B. Manajemen Pariwisata

1. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Menurut Hunziker dan Kraft dalam buku Diane Tangian, yang berjudul Pengantar Pariwisata, mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing atau Pengantar Pariwisata keseluruhan hubungan perjalanan itu tidak untuk bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk mencari nafkah. Sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.¹⁷

b. Jenis Pariwisata

Konsep bentuk pariwisata yang diteliti oleh peneliti adalah pariwisata pantai, karena sesuai dengan objek penelitian yaitu di Pantai Kelapa yang ada di Kabupaten Tuban. Pariwisata Pantai (*Marine Tourism*) adalah aktivitas yang dibantu oleh fasilitas yang ada seperti wahana dan juga keindahan pantai untuk kegiatan berenang dan juga memancing serta adanya warung makan untuk tempat istirahat beberapa pengunjung wisata.¹⁸

c. Konsep participant stakeholders dalam pariwisata

Perkembangan bisnis pariwisata dizaman sekarang sangat pesat, akan tetapi perlu beberapa *participant stakeholders*, yang selalu

¹⁷ Diane Tangian, *Pengantar Pariwisata* (Politeknik Negeri Manado, 2020).3

¹⁸ Ghanis Haryendra Damara dkk., "Perilaku Pencarian Informasi Pariwisata Para Wisatawan Domestik Di Rumah Mode," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 2, no. 1 (2014).7

berkolaborasi untuk menciptakan suatu bisnis pariwisata yang berkembang baik dan semakin dikenal masyarakat luas, didalam jurnal yang berjudul “Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata”, ada pendapat dari Handayani and Warsono terkait dengan pembagian kelompok *stakeholders*.¹⁹

1) *Stakeholders* Utama (Primer)

Stakeholder yang dimaksud utama adalah masyarakat sekitar yang tinggal dilokasi destinasi wisata sebagai pelaku utama, dalam hal ini penting juga memberikan edukasi melalui pelatihan dan seminar, dari pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap tentang bisnis pariwisata, masyarakat harus dilibatkan secara penuh agar sesuai dengan tujuan bisnis pariwisata itu sendiri.

2) *Stakeholders* Kunci

Stakeholder kunci adalah Pemerintah, Pemerintah memiliki wewenang untuk berjalannya suatu bisnis pariwisata, seperti pembuatan kebijakan, menyelesaikan masalah, dan membantu penyuluhan dan pengembangan lokasi wisata yang sedang ditempati, pemerintah memiliki hak untuk memberikan hukuman apabila bisnis yang sedang berjalan menyalahi aturan dan berdampak negatif di masyarakat.

¹⁹ Desrika Talib, “Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Destinasi Wisata,” *Jurnal Nasional (Arjuna)* 3, no. 1 (2021).9

3) *Stakeholder* Pendukung

Stakeholder Pendukung adalah investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti, keseluruhan *Stakeholder* memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah, dengan arti lain menjadi pemberi pertimbangan dan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan atau memberi keputusan dalam suatu masalah yang muncul, selain itu *Stakeholder* ini bisa juga memberikan pengaruh terhadap sikap masyarakat ataupun pengunjung terhadap hasil keputusan dari pemerintah. mereka juga membantu pengelola bisnis wisata dalam menemukan ide dan kreativitas dalam menunjang perkembangan bisnis wisata yang berkelanjutan.

Dari keseluruhan pembagian *stakeholders* tersebut, konsep dari *participant stakeholders* adalah bagaimana bentuk kolaborasi dari semua elemen dalam menunjang atau menciptakan bisnis pariwisata yang sehat dengan tanpa menjatuhkan satu sama lain, karena tiap dari elemen mempunyai peran masing-masing untuk menciptakan bisnis pariwisata yang berkelanjutan.

2. Manajemen Pariwisata

a. Pengertian manajemen pariwisata disampaikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Darwis menyatakan manajemen pariwisata adalah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan layanan pariwisata,

perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman budaya.

- 2) Bambang & Roedjinandari mengatakan manajemen pariwisata pada dasarnya menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya pariwisata, interaksi antara wisatawan dengan alam dan masyarakat lokal di daerah tujuan wisata.
- 3) Gabur & Sukana menyampai manajemen pariwisata sebagai suatu instrumen yang spesifik digunakan agar sebuah instansi dapat mencapai hasil guna mendapatkan fasilitas destinasi pelayanan yang mengacu dengan kepariwisataan.
- 4) Manson, Johnston & Twynam memberi batasan manajemen pariwisata adalah kegiatan memindahkan sementara tempat-tempat wisata ke beberapa tujuan selain pekerjaan atau tempat tinggal dan mengkoordinasikannya sehingga anggota dapat menikmatinya.

Manajemen pariwisata didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pariwisata dalam rangka mencapai tujuan pariwisata

b. Prinsip manajemen pariwisata yaitu:

- 1) Pariwisata yang dibangun dan dikembangkan harus berlandaskan pada kearifan lokal dan special local sense yang mencerminkan ciri khas unik situs budaya dan lingkungan.
- 2) Kawasan pariwisata yang dikembangkan harus bertumpu pada konservasi, perlindungan, serta pertumbuhan kualitas sumber daya.
- 3) Budaya lokal menjadi sumber utama dalam mengembangkan atraksi

wisata tambahan.

- 4) Keunikan budaya dan lingkungan lokal menjadi tumpuan utama dalam memberikan pelayanan pada wisatawan yang berkunjung.
- 5) Mendukung dan menerima pembangunan dan pengembangan pariwisata apabila telah terbukti membawa dampak positif.

c. Fungsi Manajemen Pariwisata

Fungsi-fungsi manajemen pariwisata tidak boleh lepas dari fungsi-fungsi manajemen pada umumnya yaitu dimulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Keempat fungsi manajemen ini disebut dengan fungsi dasar dan harus dilaksanakan dalam proses manajemen. Dengan demikian fungsi manajemen pariwisata terdiri dari:

- 1) perencanaan pariwisata (*tourism planning*)
- 2) pengorganisasian pariwisata (*tourism organizing*)
- 3) penggerakan pariwisata (*tourism actuating*)
- 4) pengawasan pariwisata (*tourism controlling*).²⁰

C. Manajemen dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Manajemen Syariah

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung dalam bukunya yang berjudul *Manajemen syariah dalam Praktik*, Manajemen syariah adalah penerapan ilmu manajemen yang berbasis pada nilai-nilai keimanan,

²⁰ Erika Revida dkk., *Manajemen Pariwisata* (Yayasan Kita Menulis, 2022).10

ketauhidan, dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qur'an sebagai dasar pengelolaan unsur-unsur manajemen agar dapat menggapai target yang dituju, manajemen syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa manajemen (*idaarah/tadbiir*) itu adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien.²¹

2. Indikator Manajemen syariah

Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung ada beberapa indikator dalam konsep manajemen syariah yaitu:

a. Perilaku

Perilaku disini terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari Allah swt, hal ini mencakup:

²¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam Praktik* (Gema Insani Press, 2003), 5.

- 1) Niat Ikhlas Kepada Allah SWT
- 2) Pelaksanaan sesuai dengan syariat
- 3) Dilakukan penuh kesungguhan

b. Struktur Organisasi

Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur kehidupan dunia, peranan manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu merupakan sunnatullah. Ayat ini mengatakan bahwa kelebihan yang diberikan itu (struktur yang berbeda-beda) merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik, yang mem-punyai posisi penting, yang strukturnya paling tinggi, akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain.

c. Sistem

Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima, yaitu, wajib, sunnah (*mandub*), mubah, makruh, dan haram. aturan-aturan itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan Pelaksanaan sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kegiatan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, dalam hal ini harus adanya konsep adil, transparansi dan amanah.

Dalam ilmu manajemen, pelaksanaan sistem yang konsisten akan melahirkan sebuah tatanan yang rapi, sebuah tatanan yang disebut sebagai manajemen yang rapi.²²

3. POAC dalam Konsep Manajemen Syariah

Berikut merupakan Penjelasan tentang Konsep POAC dalam Manajemen syariah

a. Perencanaan (*At-Takhtith*)

Merupakan semua rangkaian kegiatan yang diambil atau ditetapkan bagaimana proses untuk menjalankan Perencanaan tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan saat itu dan mampu mempertimbangkannya agar tidak terjadi kegagalan didalam merumuskan suatu masalah atau kegiatan dan selalu menekankan adanya Prinsip-prinsip yang telah ada.²³

b. Organisasi (*At-Thandhim*)

Dalam konteks manajemen, organisasi atau organizing memiliki keterkaitan erat dengan istilah dalam bahasa Arab yaitu *tandhim* yang diartikan sebagai wadah atau sistem yang mengatur pembagian tugas, fungsi, serta hubungan kerja antar individu baik secara vertikal maupun horizontal. (*At-tandhim*) tidak hanya sebatas pembentukan kelompok, tetapi juga mencakup penentuan peran, tanggung jawab, wewenang, serta koordinasi antar bagian agar kegiatan berjalan efektif dan efisien,

²² Ibid., 5–11.

²³ Khoirul Alim dkk., “Perencanaan (Takhtith) dalam Islam: Konsep, Unsur, dan Fungsinya,” *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 3, no. 1 (2025).²²

sehingga menjadi fungsi penting dalam manajemen sebagai penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara sistematis.²⁴

c. Pengarahan (*At-Taujih*)

Konsep ini melibatkan proses pemberian bimbingan, motivasi, serta pedoman kepada individu maupun kelompok agar bekerja dengan visi yang selaras dengan ajaran Islam dan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada nilai-nilai etika, tanggung jawab moral, dan visi keislaman. Sedangkan *Tansiq* (pengaturan) bertujuan untuk memastikan adanya koordinasi dan sinergi antara elemen-elemen organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya pengarahan dan pengaturan dalam kehidupan sosial dan organisasi. Misalnya, konsep *syura* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, amanah (tanggung jawab) dalam menjalankan kepemimpinan, serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan.²⁵

d. Pengendalian (*Ar-Riqabah*)

Dalam manajemen, controlling dalam perspektif Islam dikenal sebagai *riqabah*, yaitu proses pengawasan dan pengendalian untuk

²⁴ Fuad Riyadi, "Urgensi Manajemen Dalam Bisnis Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2015).12

²⁵ Arawan dkk., "Konsep Taujih wa Tansiq dalam Islam: Implementasi dalam Manajemen dan Kepemimpinan," *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research* 3, no. 1 (2025).9

memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan syariat. *Riqabah* mencakup pengawasan eksternal dan internal (*muraqabah*) yang menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga mendorong kejujuran dan amanah. Dalam fungsi manajemen, *controlling* berperan mengevaluasi kinerja, mendeteksi penyimpangan, dan melakukan perbaikan agar tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien, serta berlandaskan nilai moral dan akuntabilitas.²⁶

4. Prinsip keadilan, amanah, transparansi dan Hisbah dalam Manajemen Syariah

a. Prinsip keadilan dalam Manajemen Syariah

Prinsip ini menekankan dalam penerapannya harus menghindari kezaliman termasuk unsur penindasan, penerapan keadilan juga memberikan segala sesuatu kepada orang lain sesuai porsinya. dalam konteks manajemen syariah keadilan diharapkan semua elemen mampu selalu menjaga itikad baik seperti pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, memberikan perlakuan yang sama, dan menghindari penipuan dalam semua bentuk Kerjasama.²⁷

b. Prinsip amanah dalam Manajemen Syariah

Prinsip amanah dalam manajemen syariah menuntut pengelola untuk menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, transparan,

²⁶ Fariz Ramadan dkk., "Controlling (Riqabah) Dalam Perspektif Islam," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025).15

²⁷ Andi Fakhriyah Mumtihan, Haqiqi Rafsanjani, "Peran Nilai Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Agama-agama* 7, no. 1 (2021).7

dan profesional serta tidak menyalahgunakan wewenang, sehingga tercipta pengelolaan yang adil dan dapat dipercaya serta membawa kemaslahatan bagi semua pihak

c. Prinsip Transparansi dalam Manajemen Syariah

Prinsip transparansi dalam manajemen syariah menuntut adanya keterbukaan informasi, kejelasan dalam pengelolaan keuangan dan akad, serta komunikasi yang jujur dan akuntabel, sehingga dapat menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan menciptakan kepercayaan serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

d. Prinsip Hisbah dalam Manajemen Syariah

Prinsip *hisbah* dalam manajemen syariah merupakan konsep pengawasan yang bertujuan untuk menegakkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) dalam setiap aktivitas organisasi. Dalam praktiknya, *hisbah* menekankan pentingnya pengawasan yang sistematis, transparansi dalam penyampaian informasi, serta akuntabilitas setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan.

5. Larangan Riba, *Gharar* dan *Tadlis* dalam Manajemen Syariah

a) Larangan *Riba*

Riba adalah bunga yang dibebankan pada pinjaman, dalam konteks kemitraan, riba berarti jumlah tambahan yang ada didalam suatu transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. riba ini dilarang karena menghindari kerugian satu sama lain dan juga dengan hal itu

penerapan dari suatu Kerjasama bisa secara maksimal, dan dapat memberikan kenyamanan dalam bermitra.

Macam macam riba menurut Ulama Syafi'iyah yaitu:

- 1) *Riba Fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.
- 2) *Riba Yad* Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.
- 3) *Riba Nasi'ah* yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

b) Larangan *Gharar*

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak transaksi bisnis, dan juga dalam bisnis syariah, transaksi yang dilakukan harus nyata dan terbuka, agar terhindar dari gharar atau ketidakjelasan dalam bertransaksi.²⁸

Jenis-jenis *Gharar* ada 3 yaitu

- 1) Jual beli ma'dum, membeli barang yang belum ada,
- 2) Jual beli mudhamin dan malaqih

²⁸ Adhy Firdaus dkk., *Etika Bisnis Syariah* (Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2024).8

3) Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya

c) Larangan *Tadlis*

Tadlis adalah suatu penipuan transaksi yang berisi tentang kekurangan suatu hal dan tidak diketahui oleh salah satu pihak. dalam melakukan transaksi Tidak boleh ada unsur penipuan atau manipulasi dalam kontrak kerjasama.²⁹

6. Pariwisata dalam Manajemen Syariah

Pariwisata dalam ekonomi islam berarti perjalanan. Jika Anda seorang penganut Islam, kata "*safar*" (perjalanan) memiliki konotasi yang beragam. Perjalanan Muslim digambarkan sebagai jihad dalam Quran, Namun, Islam mengajarkan bahwa cara terbaik untuk belajar tentang ciptaan Allah adalah dengan melakukan perjalanan dan membaca tentang penggerak yang membentuknya, mengambil keindahan ciptaan yang luas sebagai jiwa manusia, untuk meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah dan menginspirasi seseorang untuk melakukannya. tanggung jawab seseorang dalam hidup.

Konsep dari Pariwisata dalam Manajemen syariah adalah bagaimana kita menjaga kesinambungan satu sama lain dan juga selalu menjaga kepatuhan dalam hukum islam, sehingga membuat pengunjung menjadikan pariwisata juga bentuk ibadah mereka sebab pariwisata yang berarti perjalanan adalah perjalanan dalam mencari keridhaan dari Allah SWT.³⁰

²⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada, 2021).6

³⁰ Deden Sukirman dan Wandy Zulkarnaen, "Manajemen Pariwisata Halal dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2022).14

D. Kerangka berpikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

